

## Analysis of the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Increasing the Development of Coastal Areas in the Kulon Progo Regency Area

Andi Fajar Asti<sup>1\*</sup>, Marja Sinurat<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan dalam Negeri, Jakarta

**Corresponding Author:** Andi Fajar Asti [drandifajarasti@gmail.com](mailto:drandifajarasti@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Regional Revenue Budget, Increasing Development

*Received :* 2 September

*Revised :* 15 September

*Accepted:* 15 October

©2023 Asti, Sinurat: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRACT

Kulon Progo Regency has the potential to improve coastal areas, but because of the impact of evictions on airport construction it has an impact on the lives of pond farmers. The shift in land use causes a shift in people's lives and economic activities. This requires government support in implementing decentralization to improve the quality of coastal area communities and development that can benefit the community and increase regional income. Research Method The type of research used in the research is a descriptive method with a qualitative approach. The focus of this research is: regional financial planning and implementation, responsibility for responsibility and financial reports, asset management in planning, implementation and supervision of regional assets. Problems become obstacles in financial management and supporting factors. The government provides input to encourage people to take advantage of business opportunities in coastal areas. Government support is very necessary to support social and economic disparities. It is hoped that APBD assistance will be able to help, carry out programs that have been determined by the Forestry and Maritime Service government. The APBD distributed must remain targeted to develop sustainably so that the community can support the economy to meet their daily needs

## **Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Peningkatan Pembangunan Kawasan Pesisir di Kawasan Kabupaten Kulon Progo**

Andi Fajar Asti<sup>1\*</sup>, Marja Sinurat<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan dalam Negeri, Jakarta

**Corresponding Author:** Andi Fajar Asti [drandifajarasti@gmail.com](mailto:drandifajarasti@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Anggaran Pendapatan Daerah, Peningkatan Pembangunan

*Received :* 2 September

*Revised :* 15 September

*Accepted:* 15 October

©2023 Asti, Sinurat: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRAK

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi dalam meningkatkan kawasan pesisir, tetapi karena dampak penggusuran terhadap pembangunan bandara berdampak kepada kehidupan para petani tambak. Pergeseran fungsi lahan yang beralih fungsi menyebabkan terjadinya pergesernya kehidupan masyarakat dan kegiatan aktifitas perekonomian. Hal tersebut perlu menjadi dukungan pemerintah dalam penerapan desentralisasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat kawasan pesisir dan ekspansi yang dapat menguntungkan masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Metode penelitian adalah menggunakan klasifikasi penelitian yang mendukung yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu: perencanaan dan realisasi keuangan daerah, penanggung jawaban dan laporan keuangan, pengelolaan aset dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aset daerah. Masalah menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan dan faktor pendukungnya. Pemerintah memberikan masukan untuk mengajak masyarakat memanfaatkan peluang usaha di kawasan pesisir. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk menopang kesenjangan sosial dan ekomi terjadi. Bantuan APBD diharapkan dapat membantu, menjalankan program-program sudah di tentukan oleh pemerintah Dinas Kehutanan dan Kelautan. APBD disalurkan harus tetap sasaran yang dapat berkembang secara berkelanjutan supaya masyarakat dapat menopang perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam aspek wilayah pesisir dan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Kawasan pesisir mempunyai potensi dengan pendayagunaan sumber daya alam dan manusia yang dapat meningkatkan pendapatan APBD. Zona pesisir kawasan Indonesia menjadi ekuivalen dengan wilayah yang terbelakang segi ekonomi, pembangunan masih jauh dibaningkan dengan kota, akibat minimnya pembangunan dan program-program padda penataan kawasan (Putra, 2016) ada lokasi jauh dari pusat-pusat perkotaan untuk menuju kawasan membutuhkan waktu lebih lama. Kawasan tersebut masih minim penerangan jalan, akses jaringan jalan, penerangan, teknologi, sarana prasarana kurang memadai serta pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan kekayaan alam kawasan kelautan dan perikanan belum maksimal.

Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu wilayah letak di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia bagian selatan yang terletak wilayah barat Provinsi Yogyakarta. Potensi dimiliki pada sektor perikanan dan kelautan yaitu memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan memiliki dukungan untuk dikembangkan(Progo, 2023). Dalam penggunaan informasi anggaran keuangan daerah perlunya transparansi disajikan pemerintahan daerah tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang dapat digunakan secara tepat pengeluarannya. Informasi keuangan yang jelas dapat mengantisipasi permasalahan konflik dan dana disalurkan tetap sasaran, dengan mengerahui kondisi anggaran diharapkan penyelewengan di dalam manajemen dan pelaporan keuangan daerah dapat antisipasi pada setiap aktivitas dalam mengelola keuangan daerah untuk selalu dipantau dan terbuka pada menyampaikan dengan transparan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di dalam melaporkan keuangan daerah (Ardi Rahmawan Saputra, 2012.) Kondisi sumber daya alam (SDA) Tahun 2021 yang merupakan potensi kelautan dan perikanan meliputi panjang garis pantai 24.80 km, luas laut 158.72 km, luas perairan umum/luas genangan (air tawar) 1.473.36 Hektar. Potensi lahan budidaya perikanan di Kabupaten Kulon Progo 22.801.77 Hektar (Perubahan Rencana Strategis Pangkat Daerah (RenstraPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023-2026). Dulkiah et al. (2018) menunjukkan bahwa program transfer tunai bersyarat fokus.

## TINJAUAN PUSTAKA

Program Keluarga Harapan (PKH) belum efisien dalam memajukan taraf kehidupan sosial ekonomi rumah tangga miskin (Lestari et al., 2022). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai selektif didalam menentukan prioritas menggunakan anggaran daerah untuk program membantu meningkatkan perekonomian di kawasan pesisir. Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat kawasan pesisir menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dengan memanfaatkan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) uang tepat sasaran. Pro dan Kontra dalam pembangunan bandara terletak di kawasan pesisir pantai mempengaruhi perubahan alih fungsi lahan tadi tempat objek

wisata dan pengelolaan tambak menyebabkan pengusaha tambak pada gulung tikar. Hal tersebut berdampak pada aktifitas dan kehidupan ekonomi masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial.

Rumusan masalah adalah menjelaskan pemahaman laporan pemanfaatan anggaran daerah untuk meningkatkan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Kulon Progo dalam simultan pemanfaatan anggaran APBD untuk kemasjuaan kawasan pesisir.

## **METODOLOGI**

Jenis riset yang digunakan peneliti adalah mentelaah metode deskriptif melalui pendekatan yang arah kualitatif. Teknik penelitian pendalaman merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk mengamati dengan meriset pada kondisi keilmuan (eksperimen) dimana peneliti selaku instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna menurut (Sugiyono, 2018).

Pokok di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan Keuangan Daerah
- b. Penanggung jawabandan laporan keuangan
- c. Pengelolaan Aset dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aset daerah
- d. Masalah menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan dan faktor pendukungnya.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kulon Progo di kawasan Pesisir memperoleh data bersumber dari data primer dan sekunder (data publik baik secara online maupun offline). Teknik pengumpulan melalui observasi dan dokumentasi.

### **Gambaran Umum Wilayah**

Umum wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627.54/Ha, maka secara administratif wilayah terbagi menjadi dua belas (12) kecamatan diantaranya meliputi 88 desa dan 930 dusun. Fungsi penggunaan lahan tanah yaitu sawah 10.732.04/Ha (18.30%); tegalan 7.145.42/Ha (12.19%); kebun campur 31.131.81/Ha (53.20%); perkampungan seluas 3.337.73/Ha (5.69%); hutan 1.025/Ha (1.75%); perkebunan rakyat 486/Ha (0.80%); tanah tandus 1.225/Ha (2.09%); waduk 197/Ha (0.34%); tambak 50/Ha (0.09%); dan tanah lain-lain seluas 3.315/Ha (5.65%). Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh dua prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28.57 km dan dilewati lintasan Kereta Api dengan bentang sekitar kurang lebih 25 km, sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan akses menggunakan transportasi darat.



Pembangunan wilayah pesisir pantai Kulon Progo menitikberatkan pada sistem desentralisasi dengan sistem ekonomi masyarakat sesuai kebutuhannya. Kawasan tersebut memiliki potensi dari wisata hutan magrove, tambak dan sawah, pada regulasi Pemerintahan Daerah pasal 14 disebutkan tentang bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral dibagi wewenang kekuasaan dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah Provinsi dengan cakupan wilayah kewenangan ditetapkan 0 sampai 12 mil laut. Ketetapan regulasi tersebut keterkaitan arahan menjadi kewajiban pada pemerintah provinsi dalam melaksanakan dan menetapkan peraturan daerah (Perda) RZWP3K yang sudah ditentukan.

Dalam pendayagunaan kompetensi pada aktualisasi terhadap pengembangan lingkup zonasi di kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berusaha untuk mengadakan aktivitas untuk merealisasikan pembangunan yang berdasarkan (*Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Nomor 2017 - 2022*) tentang rencana strategis perangkat daerah (Renstra) Tahun 2017 sampai 2022 yang didalamnya menjelaskan tentang Dinas Kelautan dan perikanan strategi perangkat sebagai penggambaran dari (*Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022*) dan sebagai landasan bagi Dinas dalam merancang, menyusun, menentukan dan mengikat kebijakan bagi melaksanakan pemangku tugas pokok dan kewajiban menjadi tanggung jawab. (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo, 2018) Arahan dituangkan pada renstra tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya menaikkan kualitas produksi perikanan tangkap dan budidaya pada menargetkan waktu dengan program kegiatan lima tahun ke depan pencapaian pada tahun 2019 disajikan adalah sekitar 15.923/ton. Tantangan dalam menghadapi permasalahan pada pelaksanaan pembangunan daerah pesisir untuk perikanan dan kelautan dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk membuat program dengan anggaran memadai. Arahan kebijakan pada pembangunan adalah mampu memajukan kesejahteraan para nelayan, pembudidaya pada ikan, pengolahan tambak dengan melakukan pemasaran produk tangkap dan melakukan inovasi teknologi perikanan.

#### **Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pada Dinas Kelautan dan perikanan masih mempunyai kendala dalam keterbatasan tenaga ahli pada sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan didalam pengawasan dan memberikan pelayanan kurang maksimal. Jumlah SDM kurang dari kebutuhan menjadi faktor penghambat untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya wilayah kelautan, terpaduan dalam kelola keuangan dan pengembangan program-program peningkatan kawasan pesisir. Berikut ini kebutuhan jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

Tabel 1. Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

Unit	Kebutuhan	ASN
Kepala Dinas	1	1
Sekretariat Dinas	17	10
Bidang Pembudidayaan Ikan	11	5
Bidang Pemberdayaan (Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan)	10	2
Bidang Pembangunan Usaha Perikanan	12	4
UPT Pembenihan Perikanan	8	3
UPT tempat Pelelangan Ikan	8	3
Jabatan Fungsional	37	5
Jumlah	104	33

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 537/A/2021 Tahun 2021 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Perangkat Daerah

### Pengaruh Kualitas Pelayanan dengan Fasilitas Kantor

Kualitas pelayanan merupakan faktor menjadi pendukung untuk memberikan pelayanan dengan perbedaan antara pelayanan dan harapan para pelanggan atas layanan yang diberikan oleh pelanggan, kualitas pelayanan baik dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan terhadap kualitas layanan yang secara nyata diterima klien (Suharto, 2017). Faktor ini juga didukung dengan alat-alat inventaris menunjang pemberian pelayanan berikut ini adalah kelengkapan aset diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel 2. Inventaris Barang Kantor Lingkup pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi (Unit)	%
Jumlah kendaraan Operasional Dinas	56	49	87,5
Jumlah Komputer (PC, Laptop, UPS, Printer, LCD/Viewer, Modern dan Router)	79	77	97,3
Jumlah Mebelair	299	276	92,31
Peralatan Lab. Perikanan	14	11	100
Peralatan di UPT Pembenihan Perikanan	20	20	100
Peralatan yang ada di UPT Tempat Pelelangan Ikan	43	32	91,43
Papan Nama OPD	1	1	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

### **Dampak Negatif Terjadi Masyarakat Petani Tambak**

- a. Masyarakat petani tambak yaitu kurangnya interaksi sosial yang diberikan diperburuk dengan kondisi lahan yang mengalami penggusuran menyebabkan petani tambak kehilangan mata pencarian untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Petani tambak tidak seluruh mendapat ganti rugi hanya sebagian lahan diganti, dari dampak penggusuran mempengaruhi bisnis usaha udang. Penghasilan diperoleh menjadi berkurang yang mempengaruhi dalam pertumbuhan perekonomian untuk masyarakat mengalami penggusuran lahan.

### **Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Kulon Progo**

Pemerintah memberikan masukan untuk mengajak masyarakat memanfaatkan peluang usaha di kawasan pesisir dibangun bandara tidak menggandalkan dari dana penggusuran saja karena tidak semua masyarakat dapat pembagian pembebasan lahan. Pembangunan skala nasional harus pemerintah mempertimbangkan strategi apa saja yang dapat mengantisipasi permasalahan akan terjadi. Pemerintah harus mendorong strategi yaitu dari makro, sektoral dan strategi untuk daerah dapat meningkatkan pemasukan pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo. Anggaran APBD merupakan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 1 tahun program kegiatan dilapang. Alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah Kulon Progo lebih diprioritaskan kepada pembangunan dan pengalokasian dana dengan koordinasi dengan DPRD, legislatif. Sebagai wujud transparansi dalam proses pelaksanaan pada tahun anggaran 2023 yang sudah diatur di dalam Perda (*Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023*) dan dijabarkan dengan Perbup (*Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023*). Berikut ini laporan realisasi anggaran APBD Kabupaten Kulon Progo adalah:

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Desember 2021-Desember 2022

No	Keterangan	Anggaran APBD 2022	Realisasi Tahun 2022	Persen	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Daerah	47050000	47.050.000,00	100,00	43.180.500,00
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	47050000	47.050.000,00	100,00	43.180.500,00
3	Retribusi Daerah	47050000	47.050.000,00	100,00	43.180.500,00
4	Belanja Daerah	6383338938	5.280.262.517,00	82,72	5.948.660.945,00
5	Belanja Operasi	6328173938	5.230.436.517,00	82,65	5.887.328.245,00
6	Belanja Pegawai	2603229110	2.165.810.324,00	83,20	2.308.913.177,00
7	Belanja Barang dan Jasa	1263796828	1.204.453.101,00	95,30	1.033.445.231,00
8	Belanja Hibah	2461148000	1.860.173.092,00	75,58	2.538.969.837,00
9	Belanja Modal	55165000	49.826.000,00	90,,32	61.332.700,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55165000	49.826.000,00	90,32	61.332.700,00

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2023)

Tabel 4. Neraca Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2022

Keterangan	2022	2021
Persediaan Aset	7.566.000,00	3.576.000,00
<b>Aset Tetap</b>		
Tanah	446.000.000,00	446.000.000,00
Peralatan dan Mesin	5.833.558.200,00	6.282.172.296,00
Gedung dan Bangunan	9.806.298.119,00	8.570.984.729,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.739.909.477,00	913.211.477,00
Aset tetap lainnya	770.000.000,00	441.176,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	29.810.000,00	29.810.000,00
Asumsi Penyusutan	- 9.777.056.630,00	- 9.060.516.871,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>8.848.519.166,00</b>	<b>7.182.102.807,00</b>
Aset lainnya	441.176,00	-
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8.856.526.342,00</b>	<b>7.185.678.807,00</b>
Uang Belanja	3.080.124,00	1.710.370,00
<b>Ekuitas</b>	<b>8.853.446.218,00</b>	<b>7.183.968.437,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>8.853.446.218,00</b>	<b>7.185.678.807,00</b>

Sumber: Diolah Peneliti (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023)

Tabel 5. Pengelolaan APBD Keuangan Tahun 2023

<b>BIDANG KELAUTAN DAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2023</b>			
Keterangan	Pendapatan Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan	2.754.110.815	28.080.600	2.782.191.415
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan	2.394.742.600	48.883.400	2.443.626.000
<b>DIKLASIFIKASI APBD DALAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS KELAUTAN TAHUN 2023</b>			
Keterangan	Pendapatan Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja
Dinas Kelautan	28.080.600	28.080.600	28.080.600
Dinas Kelautan	28.080.600	76.964.000	5.225.817.415
<b>REKAPITULASI BELANJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN Tahun 2023</b>			
Keterangan	Pendapatan Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.094.038.200	2.035.080.500	4.129.118.700
Dinas Kelautan dan Perikanan	5.148.853.415 7	5.148.853.415 7	5.225.817.415
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	308.732.400	44.896.500	353.628.900
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	45.888.70	17.044.50	62.933.20
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.566.042.60		1.566.042.600
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	67.999.900	0	67.999.900
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	67.999.900	0	67.999.900
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di	67.999.900	0	67.999.900

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air			
Kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	451.967.700	3.986.900	455.954.600
Kegiatan Pembinaan menjaga mutu, keamanan produk hasil perikanan bagi pelaku usaha dalam pengelolaan, pemasaran pada skala mikro/kecil	81.013.100	3.986.900	85.000.000
Bagi pelaku usaha perikanan pada skala mikro/kecil pada daerah Kabupaten/Kota ada pemberian Fasilitas mendukung	370.954.600		370.954.600
Kegiatan koordinasi, melakukan singronisasi dan mengevaluasi kebijakan pada pertanian, kehutanandan kelautan maupun perikanan	51.607.000		51.607.000

Sumber : Data Diolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

### Anggaran APBD pada Peraturan Daerah Tentang RKPD dan PPAS

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen pada perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun. Menjelaskan penjabaran RPJMD dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026) bahwa persebaran lingkup wilayah diperuntukan untuk kawasan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan luas sekitar 83,00 hektar setiap tahunnya mengalami penurunan di sektor perikanan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 menurun sekitar 16,18%. Penanganan dampak anggaran dampak dan dukungan ekonomi khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan kucuran dana sekitar Rp 2.270.000.000 sementara terrealisasikan sekitar Rp. 2.189.049.937 sekitar 96,46%.berikut ini dana disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tabel 6. Data RKPD, PPAS dan APBD Anggaran di Alokasikan di Kabupaten Kulon Progo

Penjelasan	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	5.086.109.91 5	5.086.109.91 5	9.354.936.11 5
Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	319.052.500	319.052.500	4129118700
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	319.052.500	319.052.500	-
Pengembangan Budaya Bahari	319.052.500	319.052.500	-
Urusan Pemerintah bidang Pilihan	4.767.057.41 5	4.767.057.41 5	5.225.817.41 5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.767.057.41 5	4.767.057.41 5	5.225.817.41 5
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	353.628.900	353.628.900	353.628.900
Pengelolaan pada pengkapan ikan di wilayah Danau Sungai, Rawa, Waduk, dan Genangan air sejenisnya			
Pengelolaan pada pengkapan ikan di wilayah Danau Sungai, Rawa, Waduk, dan Genangan air sejenisnya	62.933.200	62.933.200	62.933.200
Ketersediaan/ Jaminan Sarana pada Usaha Perikanan Tangkap	62.933.200	62.933.200	62.933.200
Pemberdayaan pada Nelayan Kecil dalam lingkup Daerah Kabupaten/Kota	204.695.700	204.695.700	204.695.700
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	204.695.700	204.695.700	204.695.700
Pengelolaan dan menyediakan dalam Penyelenggaraan Tempat untuk Pelelangan Ikan (TPI)	86.000.000	86.000.000	86.000.000
Pelayanan Penyelenggaraan menyediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	86.000.000	86.000.000	86.000.000
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
Pemberdayaan Pada Pembudi Daya Ikan skala Kecil	950.224.600	950.224.600	

Pengembangan Kapasitas untuk Pembudi Daya Ikan skala Kecil	950.224.600	950.224.600	
Pelayanan Penerbitan untuk Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan satu daerah	171.818.000	171.818.000	171.818.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.000.000	58.000.000	58.000.000
Konservasi pengelolaan mengawasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (Kabupaten/Kota)	113.818.000	113.818.000	113.818.000
Program Dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	67.999.900	67.999.900	67.999.900
Pengawasan pada Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, rawa Danau, , Waduk, dan Genangan (Kabupaten/Kota)	67.999.900	67.999.900	67.999.900
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Danau,sungai, rawa Waduk, dan Genangan Air	67.999.900	67.999.900	67.999.900
Program Pengelolaan, Pemasaran Hasil Produk Perikanan	455.954.600	455.954.600	455.954.600

Pembinaan kualitas Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan melakukan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	85.000.000	85.000.000	85.000.000
Pembinaan Kualitas Mutu dan Keamanan Hasil Produk Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan membantu Pemasaran Skala Mikro/ Kecil			
Pelaksanaan Bimbingan teknis dan Penerapan Persyaratan dalam Standar pada Usaha Pengolahan Produk dan Pemasaran Produk Skala Mikro/Kecil	85.000.000	85.000.000	85.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri untuk Pengolahan Ikan (Kabupaten/ Kota)			
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan di Kabupaten/Kota	370.954.600	370.954.600	370.954.600
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pemberian Fasilitas Pada Pelaku Usaha Skala Kabupaten/Kota	370.954.600	370.954.600	370.954.600

Sumber : Data Diolah Peneliti Tahun 2023

### Strataegi Pembangunan

Kegiatan pembangunan dapat menunjang daerah menjadi maju, tidak melupakan aspek ekonomi, sosial, ekologi serta budaya masyarakat. Pemerintah harus bersinergi antara masyarakat dan investor untuk kepentingan kemajuan bersama jangan tumpah tindih menitik beratkan kepentingan investor. Dengan menerapkan kerjasama anatar pemerintah, masyarakat dan swasta dapat meningkatkan kemajuan daerah kawasan pesisir. Pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan ekonomi, hibah dana diberikan untuk

pembangunan wilayah pesisir harus diawasi langsung oleh masyarakat supaya program-program untuk kemajuan wilayah dapat terjalan sesuai dengan wacana pemerintah. Pemerintah memberikan edukasi dan pelatihan karena kawasan pesisir memiliki potensi sumber daya alam, sayangnya belum sepetuh optimal dalam pemandaatan termsuk SDM.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pemerintah mengkaji ulang setiap dana dianggarkan untuk kawasan pesisir di Kabupaten Kulon Projo. Daerah-daerah kenak dampak dari pembangunan bandara menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat daerah digusur untuk pembangunan bandara harus menjadi perhatian pemerintah, karena banyak yang kehilangan mata pencarian biasa menjadi petani tambak sekarang harus mencari pekerjaan lain. Pembangunan bandar udara berpengaruh terhadap lingkungan dan tempat wisata. Pemerintah perlu membantu masyarakat untuk dapat kembali berdiri meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan membuat alternatif program-program kegiatan yang dapat membatu masyarakat dan pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo. Alokasi anggaran APDB lebih diprioritaskan atau dipusatkan kepada daerah-daerah krisis butuh bantuan untuk mengdongkrak perekonomian daerah tertinggal.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dalam Peningkatan Pembangunan Kawasan Pesisir demi menyempurnakan penelitian ini dan meneambah wawasan pembaca.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardi Rahmawan Saputra. (2012). KAJIAN PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/653/684>
- Dinas Kelautan dan Perikanan. (2023). Neraca Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Per 31 Desember 2022 dan 2021. <https://dkp.kulonprogokab.go.id/detil/501/neraca-2022>
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo. (2018). Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan Kulon Progo.
- Lestari, M., Harianto, H., & Falatehan, A. F. (2022). Strategi Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Untuk Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management), 10(2), 745. <https://doi.org/10.24843/jma.2022.v10.i02.p03>
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2023). Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas kelautan dan Perikanan. <https://dkp.kulonprogokab.go.id/detil/500/lra-2022>

- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. (n.d.).
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Nomor 2017 - 2022. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. (n.d.).
- Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. (n.d.).
- Perubahan Rencana Strategis Pangkat Daerah (RenstraPD) Dinas kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026. (n.d.).
- Progo, D. P. dan K. K. K. (2023). DARI POTENSI PERIKANAN DI KABUPATEN KULON PROGO HINGGA MENDORONG TERWUJUDNYA HARAPAN ASEAN. <https://dkp.kulonprogokab.go.id/detil/518/dari-potensi-perikanan-di-kabupaten-kulon-progo-hingga-mendorong-terwujudnya-harapan-asean>
- Putra, K. E. (2016). Perencanaan Kawasan Pesisir Sebagai Kawasan Cepat Tumbuh di Kota Medan. *Jurnal ArchiGreen*, 3(5), 54-60.
- Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026. (n.d.).
- Sugiyono. (2018). *Metode Kualitatif*.
- Suharto. (2017). Mediasi Kualitas Pelayanan Atas Kemampuan Manajerial Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Nasabah. *Jurnal Derivatif*. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/122>